

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian terkait Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Plus (Prodamas Plus) Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Di Kelurahan Burengan Kota Kediri yang telah dilakukan penulis berdasarkan 6 kriteria evaluasi kebijakan menurut William N Dunn (2003) yang menjadi fokus penelitian yaitu Efektivitas, Efisiensi, Kesamaan, Kecukupan, Responsivitas, dan Ketepatan. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas

Program Prodamas Plus terbukti efektif dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terutama pada aspek pembangunan fisik, penyediaan fasilitas publik, serta peningkatan kualitas lingkungan. Mekanisme perencanaan secara *bottom-up* memungkinkan berbagai usulan masyarakat terealisasi, berbeda dengan kondisi sebelum adanya Prodamas ketika banyak aspirasi berhenti di Musrenbang. Namun demikian, efektivitas program dalam meningkatkan pendapatan masyarakat belum tercapai secara optimal. Dampak ekonomi yang dihasilkan masih bersifat individual dan tidak merata di seluruh warga. Beberapa kegiatan pemberdayaan ekonomi tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap kenaikan penghasilan karena keterbatasan kapasitas masyarakat dan minimnya proses pendampingan lanjutan setelah pelatihan.

2. Efisiensi

Dari aspek efisiensi, Prodamas Plus telah memiliki tata kelola yang baik melalui penggunaan platform Progressio, penyelenggaraan Klinik Prodamas Plus, serta koordinasi lintas OPD terkait. Namun, efisiensi pelaksanaan masih menghadapi beberapa kendala, seperti waktu pelaksanaan yang terlalu singkat, beban administratif yang tinggi, dan kurangnya kesiapan teknis Pokmas dalam mengelola laporan pertanggungjawaban. Kondisi tersebut menyebabkan beberapa kegiatan, khususnya kegiatan ekonomi dan pemberdayaan, tidak berjalan maksimal karena waktu implementasi tidak sebanding dengan kompleksitas kegiatan.

3. Kecukupan

Dalam konteks kecukupan, program ini sudah cukup memenuhi kebutuhan masyarakat pada tingkat dasar, khususnya terkait infrastruktur, kesehatan lingkungan, sosial, dan fasilitas umum. Namun, kecukupan untuk menjawab masalah utama masyarakat, yaitu peningkatan pendapatan rumah tangga, belum tergolong memadai. Kegiatan pelatihan usaha, bantuan sarana ekonomi, dan pembentukan kelompok ekonomi produktif belum mampu menghasilkan perubahan ekonomi yang signifikan karena keterbatasan modal, minimnya keberlanjutan kegiatan, dan kurang optimalnya pendampingan pasca pelatihan. Dengan demikian, kecukupan program baru mencapai level dasar (*basic adequacy*) dan belum mencapai tingkat kecukupan penuh pada aspek pemberdayaan ekonomi.

4. Kesamaan

Pada aspek kesamaan, Prodamas Plus berhasil mewujudkan pemerataan kesempatan pembangunan melalui alokasi anggaran Rp100 juta per RT tanpa diskriminasi. Infrastruktur dan fasilitas publik tersebar merata sehingga hampir semua warga memperoleh manfaat yang setara dari sisi layanan fisik. Meskipun demikian, kesetaraan dalam hasil ekonomi belum sepenuhnya terwujud. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam program pelatihan dan pemberdayaan menyebabkan manfaat ekonomi lebih banyak dinikmati oleh kelompok warga yang aktif dan memiliki kemampuan lebih baik. Dengan kata lain, kesamaan akses sudah tinggi, tetapi kesamaan hasil (*equity of outcome*) masih rendah.

5. Responsivitas

Prodamas Plus menunjukkan tingkat responsivitas yang tinggi. Pemerintah Kota Kediri menyediakan berbagai kanal partisipasi dan pengaduan seperti rembug warga, Musyawarah Kelurahan, aplikasi Progressio, Klinik Prodamas Plus, hingga layanan SURGA (Suara Warga). Seluruh mekanisme tersebut memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi dengan cepat dan memperoleh tindak lanjut secara terbuka dan akuntabel. Selain itu, pemerintah juga memberikan apresiasi melalui Prodamas Plus Award, yang menunjukkan komitmen untuk merespons kinerja masyarakat secara positif. Hal ini menegaskan bahwa program telah responsif terhadap kebutuhan dan dinamika sosial masyarakat Burengan.

6. Ketepatan

Ketepatan Prodamas Plus terlihat dari kesesuaian kebijakan dengan kebutuhan dasar masyarakat serta konsistensi pelaksanaan dengan regulasi yang berlaku. Program ini relevan dalam menjawab permasalahan infrastruktur, sosial, dan layanan publik yang selama ini menjadi tuntutan warga. Namun, ketepatan program dalam menjawab tujuan utama penelitian, yaitu peningkatan pendapatan, belum sepenuhnya tercapai. Hal ini disebabkan oleh ketidaksesuaian antara jenis kegiatan ekonomi yang dipilih dengan potensi ekonomi lokal, serta belum adanya pemetaan sektor ekonomi unggulan. Dengan demikian, ketepatan kebijakan di tingkat implementasi sudah baik, tetapi ketepatan dampak program dalam meningkatkan pendapatan masih belum optimal.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap implementasi Prodamas Plus terdapat sejumlah catatan penting yang dapat dijadikan dasar perbaikan bagi program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang akan dirancang di masa mendatang. Rekomendasi berikut disusun dengan merujuk pada enam kriteria evaluasi kebijakan William N. Dunn dan temuan lapangan. Berikut penulis memberikan saran dan masukan yang berkaitan dengan hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Pihak Pemerintah Kota Kediri disarankan untuk melakukan *background checking* di setiap wilayah kelurahan sebelum melakukan rembug warga, untuk mengetahui potensi maupun *background* masyarakat yang tinggal di kelurahan

tersebut agar program yang diberikan benar benar memberdayakan potensi lokal di wilayah tersebut.

2. Pihak Pemerintah Kota Kediri disarankan untuk memperbaiki mekanisme pencairan anggaran agar tidak terlambat, sehingga kegiatan dapat berjalan tepat waktu sesuai rencana. Selain itu, kelurahan dan Pokmas perlu memperkuat perencanaan kegiatan sejak awal tahun agar pelaksanaan tidak menumpuk di akhir periode.
3. Peningkatan kapasitas Pokmas dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan swakelola juga penting agar penggunaan sumber daya semakin efektif.
4. Pendampingan teknis dari kelurahan perlu ditingkatkan, tidak hanya saat pelaksanaan, tetapi juga sejak tahap perencanaan, agar masyarakat lebih paham mana yang lebih diprioritaskan.
5. Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat Burengan, pemerintah perlu memperkuat perencanaan kegiatan ekonomi yang sesuai kebutuhan warga, memberikan pelatihan yang lebih terarah dengan pendampingan berkelanjutan, serta mengoptimalkan bantuan alat agar menghasilkan produk bernilai jual. Penguatan pemasaran terutama digital juga penting agar produk lokal memiliki akses pasar yang lebih luas dan pendapatan masyarakat dapat meningkat secara berkelanjutan.